

EVALUASI KEBIJAKAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER

Anggi Lasmana 1610511049 Putri Robiatul Adawiyah., S.Sos.M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi
Ilmu Pemerintahan

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik penentuan purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan mengelompokkan dan menggabungkan data yang diperoleh. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber sehingga data yang disajikan adalah data yang valid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan parkir berlangganan sudah efektif karena target pencapaian selalu meningkat dari tahun ke tahun, serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Efisien adanya kesesuaian antara sasaran/target yang ditetapkan dengan biaya yang dikeluarkan, Kecukupan Berkaitan dengan program parkir berlangganan menimbulkan beberapa masalah. Masalah-masalah tersebut timbul setelah program diterapkan di lapangan dengan adanya kegiatan pengawasan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Jember kelemahan tersebut masih dapat teratasi oleh pihak Jukir dan pihak Dinas Perhubungan. Namun terdapat beberapa keuntungan dan manfaat yang muncul ketika program tersebut diterapkan, yaitu memberikan keuntungan berupa pendapatan daerah yang dikelola oleh Kas Daerah, Responsivitas Program parkir berlangganan sudah bisa diterima masyarakat Kabupaten Jember mengingat manfaat yang diberikan, meskipun untuk awal penerapannya masih membuat masyarakat bingung pada cara penggunaannya. Namun, sudah teratasi sehingga sebagian masyarakat telah mampu memanfaatkannya dengan baik, Perataan program ini telah dirasakan oleh semua masyarakat Jember di desa maupun kota, Ketepatan Adanya kebijakan retribusi parkir berlangganan ini merupakan pertimbangan dari beberapa lembaga terkait yang di prediksi akan meningkatkan pendapatan daerah sesuai dengan kenyataan karena pelanggan berdampak pada ketertiban dan kenyamanan pengguna parkir dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan parkir Berlangganan.

ABSTRACT

This research was conducted with a qualitative method with a purposive determination technique. Data collection is done by interview, observation and documentation. The process of data analysis is done by grouping and combining the data obtained. Data validity is tested through source triangulation so that the data presented is valid data. The results of this study indicate that the subscription parking policy has been effective because the achievement target is always increasing from year to year, and could increase Regional Revenue (PAD), Efficient conformity between the targets / targets set with the costs incurred, Adequacy Regarding the subscription parking program raises several problems. These problems arose after the program was implemented in the field with the monitoring of activities by the Jember District Transportation Office, the weakness was still overcome by the parking officer and the Transportation Office. However, there are several advantages and benefits that arise when the program is implemented, namely providing benefits in the form of regional income that is managed by the Regional Cash. Responsiveness The subscription parking program can be received by the people of Jember Regency given the benefits provided, although for the initial implementation it still makes people confused about the way its use. However, it has been resolved so that some people have been able to make good use of it. The smoothing of this program has been felt by all Jember people in villages and cities. The accuracy of the subscription parking fee policy is a consideration of several related institutions which are

predicted to increase regional income in accordance with reality. because the customer has an impact on the order and convenience of parking users and able to increase Regional Revenue (PAD).

Keywords: *Evaluate Subscription parking policy.*

I. PENDAHULUAN Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang pemerintah daerah, dimana otonomi daerah ini dijadikan sebagai wujud dari suatu kewenangan dalam penyelenggaraan

pemerintahan di daerah secara luas. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tentang otonomi daerah tersebut memberikan penjelasan tentang kebijakan mengenai sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah yang kemudian disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, otonomi daerah memberikan suatu kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat. Salah satu sumber pendapatan yang ada di daerah pendapatan dari parkir berlangganan dimana parkir berlangganan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar parkir yang lebih murah dibandingkan dengan membayar parkir harian atau bayar setiap kali parkir. Selain itu, parkir berlangganan bertujuan untuk ketertiban tata ruang kota sehingga aman dan nyaman.

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang menerapkan parkir berlangganan. Dasar dari kebijakan parkir berlangganan Kabupaten Jember adalah Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember dan Peraturan Bupati Jember Nomor 03 Tahun 2009 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Retribusi Parkir Harian Kabupaten Jember. Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Jember mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2009 sampai saat ini atau sudah berjalan selama 10 tahun. Pendapatan parkir sebelum ada parkir berlangganan antara 600 juta hingga Rp 1 miliar. Namun, setelah berlaku parkir berlangganan mencapai Rp 6,38 miliar, lebih banyak dari target Rp 5,5 miliar. Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Jember setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 lalu, Retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten jember sebesar 10 miliar 567 rupiah. Pada kenyataannya parkir berlangganan telah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember setiap di dasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 tentang retribusi parkir kendaraan. Penerapan peraturan daerah dilakukan sebagai salah satu wadah pemerintah daerah dalam meningkatkan atau mengembangkan potensi daerahnya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan pada pasal 6 ayat (1), yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 6 ayat (2), yaitu yang dimaksud Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang dan komisi potongan, ataupun bentuk lain sebagai

akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

2. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan perhitungan prosentasi terendah nominal besaran biaya tarif parkir berlangganan, dapat diketahui retribusi kendaraan untuk roda 2 pertahun di kenakan Rp. 20.000,00 dan roda 4 dikenakan Rp. 40.000,00. Harga tarif ini, berlaku di Kabupaten Jember. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12

Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember pada pasal 4 dijelaskan bahwa retribusi parkir dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Retribusi Parkir Berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sama dengan masa berlakunya pajak kendaraan bermotor sebagai pembayaran atas penyediaan dan atau pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.

2. Retribusi Parkir Harian adalah retribusi parkir yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan setiap 1 (satu) kali parkir pada tempat parkir di tepi jalan umum atau tempat lain yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.

3. Retribusi Parkir Jalur Panjang adalah retribusi parkir yang dipungut untuk kendaraan di dalam terminal sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir selain kendaraan penumpang yang dikenakan retribusi atau kendaraan penumpang yang sedang menunggu pemberangkatan.

Sedangkan pada pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa struktur besaran tarif Retribusi parkir 1 (satu) kendaraan ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif Retribusi Parkir Berlangganan untuk 1 (satu) tahun;

a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

b. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

c. Kendaraan Bermotor dengan roda 6 (enam) / lebih sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

d. Kendaraan Bermotor jenis Angkutan Barang roda 4 (empat) dan jenis taksi argo sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Tarif Retribusi parkir harian setiap satu kali parkir:

a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah).

b. Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat)/ lebih sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

c. Kendaraan Bermotor dengan roda 6 (enam)/ lebih sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

3. Tarif Retribusi Parkir Insidentil:

a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga) sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).

b. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)/lebih sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).

c. Kendaraan Bermotor dengan roda enam (enam)/lebih sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang pemaparan diatas, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian yaitu apakah kebijakan tarif retribusi parkir berlangganan sudah efektif, efisiensi, berkecukupan, merata, memiliki responsivitas, dan tepat. Bagaimanakah evaluasi kebijakan tarif retribusi parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, dalam penelitian yang akan dikaji berjudul

“Evaluasi Kebijakan tarif retribusi parkir Berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember”.

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, secara umum yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah evaluasi kebijakan tarif retribusi parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah evaluasi kebijakan tarif retribusi parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

II. METODE PENELITIAN Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian Tempat penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Jalan Dewi Sartika No 2 Kampung Tengah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Penelitian ini memfokuskan pada Evaluasi kebijakan tarif retribusi parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dalam jangka waktu 1 bulan yaitu bulan 02 Desember 2019 – 02 Januari 2020.

Jenis Penelitian Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini akan mengungkap fakta dengan menggunakan landasan logika keilmuan yang didukung oleh metodologi teoritis yang kuat. Menurut Lexy J. Moleong (2010:6) Mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dalam penelitian ini bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu. Fenomena yang ingin digambarkan adalah hal

yang terkait dengan evaluasi kebijakan tarif retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember. Penelitian ini fokus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

Untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber maka ditetapkan data primer dan data sekunder.

1. Data primer bersumber dari responden secara langsung. Dan wawancara. Selain itu dari pengamatan langsung terhadap situasi lokasi penelitian.
2. Data sekunder diperoleh dari sumber: dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara
Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan terhadap permasalahan yang ingin diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan pegawai dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait dengan Evaluasi Kebijakan Tarif Retribusi Parkir Berlanggan di Kabupaten Jember.

2. Observasi
Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan melibatkan diri secara langsung dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh informan.

Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

Metode Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria dan

informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang mengetahui mengenai Evaluasi Kebijakan tarif Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember. Informan yang ditentukan oleh peneliti melalui purposive sampling antara lain: Bapak Leon Lazuardy selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis, Bapak Ony Setiawan selaku Kasubag Tata Usaha, Juru Parkir Bapak Slamet Suroyo, Bapak Mustofa selaku

Bendahara Unit Pelaksana Teknis, Bapak Joko Priyanto, Bapak Roby selaku masyarakat pengendara kendaraan bermotor Kabupaten Jember.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada

perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data, yaitu:

1. Teknik triangulasi antar sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengumpulan data yang dalam hal terakhir ini peneliti akan berupaya mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalian data dari warga di lokasi-lokasi yang mampu membantu setelah diberi penjelasan.
2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian (member check).
3. Mendiskusikan dan menyeminarkan dengan tema sejawat di jurusan tempat penelitian belajar (peer debriefing), termasuk koreksi di bawah para pembimbing.
4. Perpanjangan waktu penelitian. Cara ini akan ditempuh selain untuk memperoleh bukti yang lebih lengkap juga untuk memeriksa konsistensi tindakan para informan. Adapun macam dari triangulasi memiliki tiga macam
 1. Pertama, triangulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen serta arsip yang memuat catatan berkaitan dengan data yang dimaksud.
 2. Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen.
 3. Ketiga, triangulasi waktu pengumpulan data merupakan kapan dilaksanakannya triangulasi atau metode pengumpulan data. Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, pertama triangulasi sumber data yang berupa observasi

serta wawancara dengan narasumber secara langsung dan dokumen yang berisi catatan terkait dengan data yang ingin diperoleh peneliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Tarif Retribusi Parkir Berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana. Sehingga di peroleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya. Peran pemerintah antara lain sebagai pelayan publik yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak setiap warga demi kenyamanan dan kesejahteraan bersama. Hal tersebut dikaitkan dengan fokus peneliti tentang kebijakan retribusi parkir berlangganan yang diterapkan di Kabupaten Jember. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember bidang unit pelaksana teknis (UPT) yang memiliki tugas dan fungsi menangani kebijakan tersebut. Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Kabupaten Jember Tahun 2005-2019 berkembang.

Efektifitas

Program parkir berlangganan yang berjalan sudah efektif sesuai dengan hasil yang dicapai. Efektif artinya dicapainya tujuan dalam hasil yang telah di tetapkan dalam evaluasi kebijakan tarif retribusi parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Peneliti mewawancarai Bapak Mustofa selaku bendahara dalam pertanyaan yang peneliti tanyakan adalah efektif atau tidak terkait dengan target pencapaian tersebut: "Mengenai parkir berlangganan ini sudah efektif karena sejak di berlakukannya Peraturan Bupati Jember parkir berlangganan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dibandingkan sebelum menggunakan parkir manual atau harian. Parkir berlangganan itu di mulai pada tahun 2009." (wawancara Bapak Ony Setiawan selaku sub bagian tata usaha Senin, 6 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara dari Bapak Mustofa diatas bahwa parkir berlangganan di Kabupaten Jember sejauh ini sudah bisa dikatakan efektif karena target pencapaian selalu meningkat dari tahun ke tahun, serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Mustofa selaku Bendahara Unit Pelaksana Teknis terkait efektifitas kebijakan tarif retribusi parkir berlangganan, bahwa:

"Program tarif retribusi parkir berlangganan telah terlaksana dan sampai saat ini sudah dapat dikatakan efektif, terlebih pembayaran parkir yang relatif lebih murah dan mudah dilakukan karena pembayarannya hanya setahun sekali." (wawancara Bapak Mustofa selaku Bendahara Unit Pelaksana Teknis Senin, 6 Januari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa tercapainya tujuan Dinas Perhubungan terkait efektifitas berjalan dengan baik. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Leon Lazuardy selaku Kepala UPT Parkir terkait efektifitas program tarif retribusi parkir berlangganan, bahwa: "Menurut saya program itu sudah efektif untuk diterapkan pada masyarakat. Program ini dinilai sangat membantu masyarakat, karena mudah dan murah dilakukan. Meski terdapat berbagai kendala pada saat penerapannya, tetapi hal tersebut dapat diatasi." (wawancara Bapak Leon Lazuardi selaku Kepala UPT Parkir Rabu, 8 Januari 2020)

Sesuai wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa program tarif retribusi parkir berlangganan berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala lapangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan. Hasil wawancara diatas membuktikan bahwa program tersebut diterima dikalangan masyarakat luas karena lebih mudah dilakukan dan murah. Meski begitu, para petugas Dishub selalu melakukan pemantauan kepada juru parkir yang bertugas dilapangan. Apabila terlihat juku parkir melakukan kesalahan, maka

pengawas segera melakukan pembinaan dan peneguran terkait kesalahan yang dilakukan. Ketika kesalahan yang sama dilakukan kembali, maka sanksi skorsing akan diberikan hingga terpaksa diberhentikan.

Efisiensi

Pada indikator efisiensi dapat ditemukan adanya kesesuaian antara sasaran/target yang ditetapkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal tersebut dapat dijelaskan apabila sasaran yang ingin dicapai sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai, berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan. Selain itu, sumber daya manusia juga menunjang keefisienan program tersebut seperti juru parkir yang ada di Kabupaten Jember. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember diketahui beberapa data yang memaparkan tentang keefisienan program retribusi parkir berlangganan tersebut. Hasil wawancara bersama Bapak Ony Setiawan selaku Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Jember terkait keefisienan program kebijakan retribusi parkir berlangganan, bahwa:

“Untuk program parkir berlangganan di Kabupaten Jember ini sudah bisa dikatakan efisien. Hal itu karena mudah diterapkan dan sampai saat ini program tersebut mampu meningkatkan pendapatan daerah.” (wawancara Ony Setiawan, Senin 16 Desember 2019)

Berdasarkan data tersebut ditemukan bahwa program parkir berlangganan di Kabupaten Jember sudah efisien. Hasil wawancara tersebut juga dipaparkan oleh Bapak Mustofa selaku Bendahara Unit Pelaksana Teknis terkait efisiensi kebijakan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember, bahwa:

“Kebijakan retribusi parkir berlangganan ini, sudah efisien dan bagus. Kebijakan ini juga mudah diterapkan di lingkungan masyarakat, dan penduduk desa pun juga ikut merasakan hasilnya. Hasil yang dimaksud ialah pendapatan yang dihasilkan dari parkir berlangganan berupa fasilitas umum seperti jalan, penerangan, dll.” (wawancara Mustofa, Selasa 17 Desember 2019)

Sesuai data diatas, diketahui bahwa pendapatan daerah yang berasal dari retribusi parkir berlangganan dapat di alokasikan berupa fasilitas

umum yang ada di Kabupaten Jember. Sedangkan terkait efisiensi program tersebut dipaparkan oleh Bapak Joko Priyanto selaku Bendahara Unit Pelaksana Teknis Parkir yang menyatakan bahwa:

“Program dikatakan efisien apabila program yang dibuat dan biaya yang digunakan sesuai. Biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak dibandingkan dengan programnya, dan untuk program ini sudah efisien. Hal itu karena jumlah jukir yang ada di Kabupaten Jember sudah sebanyak 315. Maka dari itu, program ini sudah bisa dikatakan efisien.” (wawancara Bapak Joko Priyanto, Selasa 17 Desember 2019)

Berdasarkan data tersebut ditemukan bahwa program parkir berlangganan benar-benar efisien dalam penerapannya. Hal tersebut termasuk biaya yang dikeluarkan dan realisasinya di lapangan. Selain itu juga didapatkan data terkait juru parkir yang bertugas di lapangan. Juru parkir diawasi oleh petugas pengawasan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember khususnya Unit Pelaksana Teknis Parkir. Adanya kecukupan juru parkir tersebut dan usaha petugas dari Dinas Perhubungan berupa pengawasan yang dilakukan sebagai penunjang keefisienan program parkir berlangganan ini.

Kecukupan

Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi Hal ini, dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan (William N Dunn).

Berdasarkan kriteria yang di imlemntasikan muncul protes dari masyarakat hasil wawancara dengan bapak Ony Setiawan selaku Kasubag bagian Tata Usaha Pelaksana Teknis sebagai berikut: “Program parkir berlangganan awalnya memiliki beberapa hambatan seperti masalah-masalah yang timbul setelah perlaksanaanya. Pada satu sisi program ini menimbulkan masalah antara lain protes

dari masyarakat yang merasa dirugikan karena ketika parkir masih harus membayar lagi. Padahal hasil pembayaran parkir bulanan memberikan manfaat yang cukup besar terutama dalam menghasilkan pendapatan daerah.”(wawancara Bapak Ony Setiawan, Selasa 17 Desember 2019)

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa kecukupan terkait program parkir berlangganan di Kabupaten Jember menimbulkan beberapa masalah. Masalah tersebut timbul setelah program diterapkan di lapangan. Permasalahan tersebut salah satunya adalah bentuk protes dari masyarakat berkaitan dengan sistem pembayaran parkir. Masyarakat menyampaikan protes kepada pihak Dinas Perhubungan terkait pungutan parkir yang dilakukan oleh juru parkir, padahal yang bersangkutan merasa telah melakukan pembayaran parkir berlangganan ketika perpanjangan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal tersebut dijadikan sebagai bentuk protes masyarakat kepada pihak Dinas Perhubungan. Namun, adanya protes tersebut pihak Dinas membuka suara dan memberikan penjelasan terkait pungutan parkir yang dimaksud oleh masyarakat tersebut, sebagai tanda pertanggung jawaban atas program dibawah naungannya. Pihak Dinas Perhubungan memberikan penjelasan bahwa pungutan yang dimaksud tersebut tidak dilakukan oleh juru parkir, melainkan bentuk welas asih para pengendara bermotor sebagai tanda terimakasih kepada jukir, karena telah menjaga kendaraannya. Selain itu, juga disampaikan bahwa juru parkir yang melakukan pungutan liar akan diberi sanksi atau hukuman hingga diberhentikan apabila sering melakukan kesalahan yang fatal. Penjelasan terkait tim pengawas lapangan yang selalu melakukan pengawasan per minggunya juga disampaikan pada masyarakat, agar semakin jelas dan bisa dipahami masyarakat luas dan tidak terjadi kesalahpahaman seperti sebelumnya. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara bersama Bapak Ony Setyawan selaku Kasubag Tata Usaha Pelaksana Teknis Parkir terkait penjelasan terhadap protes masyarakat mengenai pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir, menyatakan bahwa: “Terdapat protes masyarakat kepada Dinas, hal tersebut kami anggap sebagai masalah

dalam penerapan parkir berlangganan ini. Masyarakat menyampaikan bahwa jukir melakukan pungutan liar, tetapi sejauh ini tim pengawas tidak pernah mendapati kegiatan tersebut. Jadi, kami jelaskan bahwa hal tersebut tidak terjadi, dan apabila benar dilakukan maka akan diberi sanksi oleh tim pengawas. Sebagian besar yang terjadi dilapangan ialah pengendara bermotor memberikan uang kepada jukir sebagai bentuk welas asih atau rasa terimakasih, karena kendaraannya sudah dijaga. Jadi, sebenarnya masyarakat tidak perlu risau soal ini, karena jukir juga ada tim pengawasnya dalam setiap kegiatan yang dilakukan ditempat parkir. Setelah kami berikan penjelasan itu, masyarakat menyadari bahwa kegiatan tersebut memang dilakukan para pengendara tanpa diminta oleh jukir.”(wawancara Bapak Ony Setiawan, Rabu 18 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas cukup menjelaskan pertanggung jawaban pihak Dinas Perhubungan terhadap protes masyarakat terkait program parkir berlangganan yang diterapkan di Kabupaten Jember terutama berkaitan dengan pungutan liar. Masalah-masalah yang timbul karena berlakunya program parkir berlangganan ini, juga terdapat beberapa keuntungan dan manfaat yang muncul ketika program tersebut diterapkan untuk mengatasi keluhan-keluhan masyarakat diatas. Keuntungan yang dihasilkan dari penerapan program tersebut antara lain: 1) Keuntungan bagi Pemerintah

- a. Pelayanan parkir berlangganan meningkatkan PAD, karena tersedia sarana dan prasarana yang memadai dan didukung oleh petugas juru parkir yang profesional.
- b. Pengelolaan dan wawasan jalannya parkir lebih mudah.
- c. Mengurangi keberadaan juru parkir yang tidak terdaftar.
- d. Penerimaan PAD meningkat setiap tahunnya.

Beberapa keuntungan yang di paparkan di atas adalah manfaat yang dirasakan oleh

pemerintah mengenai program parkir berlangganan. Hasil wawancara bersama Bapak Ony Setiawan selaku Kasubag Tata Usaha Pelaksana Teknis Parkir terkait manfaat parkir berlangganan bagi pemerintah, menyatakan bahwa:

“Keuntungan bagi Pemerintah sendiri Program parkir berlangganan ini sudah bisa dirasakan, yaitu sudah jelas meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta memudahkan pengawas lapangan dalam mengawasi juru parkir yang tidak terdaftar.”(wawancara Bapak Ony Setiawan, Selasa 17 Desember 2019)

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa keuntungan bagi pemerintah membawa dampak yang sangat besar yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adanya program parkir berlangganan ini, sudah bisa di katakan memberikan manfaat yang cukup baik bagi pemerintah yaitu memudahkan pengawas lapangan mengecek keberadaan juru parkir yang tidak terdaftar.

2) Keuntungan bagi Masyarakat

- a. Biaya retribusi parkir lebih murah, karena dalam setahun hanya dipungut sekali bayar.
- b. Masyarakat tidak harus menyediakan uang *receh*.
- c. Perjalanan tidak terhambat, terutama bagi penumpang kendaraan bermotor yang tergesa-gesa.

Beberapa keuntungan yang di paparkan di atas adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat mengenai program parkir berlangganan. Hasil

wawancara bersama Bapak Roby selaku masyarakat pengguna parkir berlangganan terkait keuntungan bagi masyarakat, menyatakan bahwa:

“Keuntungan bagi masyarakat antara lain yaitu membayar parkir hanya setahun sekali, lebih hemat dan mudah, serta tidak menghambat

pengendara khususnya bagi yang terburu-buru untuk membayar parkir setiap sekali parkir.”(wawancara Bapak Roby, Selasa 18 Desember 2019)

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui keuntungan bagi masyarakat dapat disimpulkan bahwa program parkir berlangganan ini sudah memudahkan masyarakat dalam pembayaran

parkir yaitu hanya dipungut setahun sekali selain hemat dan juga mudah dilakukan. 2) Keuntungan bagi Juru Parkir

- a. Memperoleh penghasilan tetap dan pasti setiap bulan.
- b. *Take Home Pay* lebih meningkatkan.
- c. Juru parkir menggunakan seragam.
- d. Status juru parkir jelas.

Beberapa keuntungan juru parkir yang di paparkan diatas mengenai program parkir berlangganan. Hasil wawancara bersama Bapak Selamat Suroyo petugas juru parkir berlangganan terkait keuntungan bagi juru parkir, menyatakan bahwa:

“Pada penerapan program parkir berlangganan ini mempunyai keuntungan bagi juru parkir sendiri yaitu mendapat penghasilan tetap setiap bulannya, status juru parkir jelas sudah terdaftar dan menggunakan seragam juru parkir.”(wawancara Bapak Selamat Suroyo, Selasa 17 Desember 2019)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan dalam penerapan program parkir berlangganan ini mempunyai keuntungan bagi juru parkir yaitu penghasilan tetap dan pasti setiap bulan, berseragam dan status juru parkir jelas. Keuntungan-keuntungan diatas dihasilkan dari penerapan kebijakan program parkir berlangganan. Hal tersebut disampaikan melalui wawancara bersama Bapak Joko Priyanto terkait kecukupan program parkir berlangganan, yaitu:

“Setelah penerapan program ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu salah satunya dapat memberikan kontribusi berupa pendapatan daerah, sedangkan kekurangannya menimbulkan beberapa permasalahan terkait program parkir berlangganan.”(wawancara Bapak

Joko Priyanto, Rabu 18 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa kecukupan terkait program parkir berlangganan memberikan keuntungan bagi daerah. Namun, terdapat beberapa kelamahan yang muncul diterapkannya kebijakan tersebut.

Kelemahan tersebut diketahui setelah dilakukan adanya kegiatan pengawasan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Namun, kelemahan tersebut masih dapat teratasi oleh pihak Jukir dan pihak Dinas Perhubungan, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Leon Lazuardy selaku Kepala UPT Parkir terkait kecukupan program tarif retribusi parkir berlangganan, bahwa:

“Program parkir berlangganan ini ada juga kelemahannya, tapi masih bisa diatasi oleh Jukir dan pihak dari Dinas. Setiap program memang akan menimbulkan kelebihan dan kelemahan. Namun, kelemahan dalam program ini masih bisa dianggap wajar. Hal tersebut karena sebelumnya tidak ada program seperti ini di Kabupaten Jember.

Jadi masyarakat Jember perlu menyesuaikan, itu saja”. (wawancara Leon Lazuardy, Kamis 19 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, cukup menjelaskan terkait kecukupan program parkir berlangganan yang diterapkan di Kabupaten Jember. Penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa keefektifan program parkir berlangganan yang berlaku di Kabupaten Jember memberikan kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya yang terlihat ialah membantu meningkatkan pendapatan daerah

Kabupaten Jember. Sedangkan kelemahannya dapat dilihat ketika program tersebut mulai diterapkan, tetapi dampaknya tidak terlalu signifikan sehingga tetap berjalan seperti biasanya hanya saja menyelipkan program ini dan aktifitas masyarakat.

Perataan

Suatu program tertentu dapat dikatakan efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya yang digunakan serta manfaatnya merata. Salah satu kunci dari perataan tersebut yaitu keadilan atau kewajaran. Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil, yaitu semua sektor yang berasal dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan yang diterapkan. Hal tersebut karena pelayanan publik merupakan bentuk layanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik juga dapat menghasilkan jasa


publik, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Program parkir berlangganan Kabupaten Jember menurut pihak Dinas Perhubungan telah merata, sehubungan dengan biaya yang digunakan maupun manfaatnya. Namun, pemerataan yang dimaksud perlu dikupas lebih lanjut terkait program parkir berlangganan. Menurut Bapak Ony Setiawan selaku Kasubag Tata Usaha Pelaksana Teknis Parkir terkait pemerataan manfaat program parkir berlangganan, menyatakan bahwa: “Program parkir berlangganan yang diterapkan di Jember meliputi semua kecamatan didalamnya. terdapat Jukir yang beroperasi di masing-masing kecamatan, terutama ditempat-tempat keramaian seperti pasar, bank, dan tempat perbelanjaan lainnya yang membutuhkan jasa dari juru parkir. Adanya fasilitas tersebut yang diberikan oleh pemerintah daerah diharapkan mampu membantu kegiatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat”.

(wawancara Bapak Ony Setiawan, Kamis 19 Desember 2019)

Sesuai hasil wawancara diatas, cukup menjelaskan manfaat dari penerapan program parkir berlangganan tersebut. Manfaat yang disampaikan tersebut cukup memberikan keringanan kepada masyarakat, sehingga fasilitas dari pemerintah daerah tersebut sangat bermanfaat. Selain itu, manfaat yang didapatkan dari program parkir berlangganan ini ialah meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Jember. Apabila berkaitan dengan berbagai manfaat yang didapatkan dari program tersebut, tentunya banyak sekali. Namun, disini lain perlu diketahui juga biaya yang digunakan telah memenuhi syarat perataan atau belum. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Joko Priyanto selaku Bendahara Unit Pelaksana Teknis Parkir yang menyatakan bahwa: “Biaya yang digunakan dalam penerapan program parkir berlangganan sudah sesuai dengan kebutuhan terkait fasilitas parkir berlangganan tersebut. Biaya tersebut dialokasikan kepada beberapa pihak terkait

seperti Juru Parkir yang bekerja dilapangan, Tim Pelaksana Parkir, Tim pengawasan lapangan, dll. Selain itu, berkaitan dengan manfaat program ini telah dirasakan oleh semua masyarakat Jember di desa maupun kota. Masyarakat memiliki haknya dari program parkir berlangganan ini yang dialokasikan menjadi fasilitas umum lainnya seperti penerangan jalan daerah”. (wawancara Joko Priyanto, Kamis 19

Desember 2019)

 Berdasarkan hasil wawancara diatas, cukup menjelaskan mengenai biaya yang digunakan dalam program ini dan manfaat yang didapatkan masyarakat maupun pemerintah daerah itu sendiri. Pada wawancara tersebut dijelaskan bahwa biaya yang digunakan tersebut dialokasikan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Selain itu, manfaat yang diberikan program tersebut mencakup masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Jember. Keberadaan program parkir berlangganan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat serta memudahkan setiap warga desa maupun kota melakukannya. Peneliti mendapatkan data wawancara bersama salah satu juru parkir Bapak Selamet Suroyo menyampaikan, bahwa: “Pendapatan juru parkir disini dari Dishub dan pemberian dari pengendara motor secara sukarela. Kalau untuk penerapan dilapangan, masyarakat ternyata banyak yang belum paham dengan penggunaan stiker parkir berlangganan. Ketika salah satu dari jukir disini bertanya, kebanyakan masyarakat tidak tahu bahwa mendapat stiker tersebut dan menempelkannya pada plat nomor. Kami rasa hal itu yang menjadi kelemahan program ini saat ini. Berkaitan dengan efektifitas dan efisiensinya, kami rasa cukup baik dari sebelumnya” (wawancara juru parkir Jl. Trunojoyo, Jumat 20 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, cukup menjelaskan bahwa biaya yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember salah satunya benar-benar dialokasikan pada pendapatan juru parkir. Berkaitan dengan manfaat penerapan program parkir berlangganan tersebut sesuai pengawasan mandiri dari juru parkir, sangat bermanfaat. Namun, terdapat beberapa kendala yang merupakan kelemahan program ini yaitu ketidakpahaman masyarakat

dalam penggunaan stiker parkir pada plat nomor. Oleh karena itu, banyak sekali masyarakat yang masih memberikan uang parkir pada jukir. Adanya ketidakpahaman tersebut menjadikan program ini belum terlalu berpengaruh pada masyarakat. Hal tersebut perlu dijadikan evaluasi kedepannya dalam program parkir berlangganan tersebut.

Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik merupakan hal yang sangat penting. Responsivitas yang dilakukan melibatkan berbagai pihak sebagai respon dari aktifitas program parkir berlangganan ini. Respon yang dimaksud ialah tanggapan sasaran kebijakan publik yaitu masyarakat Kabupaten Jember atas penerapan kebijakan program parkir berlangganan. Berbagai pihak terkait program tersebut tentunya memiliki pendapat berbeda-beda, salah satunya didapatkan melalui wawancara bersama Bapak Hendrik Wiyanto sebagai pengawas di lapangan mengatakan, bahwa: “Tugas saya di lapangan mengawasi Jukir yang sedang bertugas dan mengawasi jukir yang melakukan pungutan liar. Apabila terdapat masalah di lapangan, saya memperingatkan Jukir agar lebih memperhatikan kendaraan-kendaraan yang di parkir. Selain itu saya juga memberikan intruksi di lapangan setiap hari senin dan kamis sekaligus melakukan evaluasi terhadap Jukir . Namun sejauh ini belum ada laporan mengenai Jukir melakukan pungutan liar, tetapi biasanya masyarakat memberikan uang secara sukarela dan sebagian besar alasannya mereka kasihan karena sudah menjaga kendaraannya” (wawancara Hendrik Wiyanto, Jumat 20 Desember 2019)

Sesuai hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa program parkir berlangganan berjalan dengan baik, dan per minggunya melakukan evaluasi oleh tim pengawas kepada para Jukir. Wawancara diatas juga menjelaskan bahwa Jukir tidak melakukan pungutan liar, melainkan masyarakat yang memberikan uang secara

sekarela sebagai bentuk terimakasih atas penjagaan yang dilakukan oleh Jukir. Hal tersebut juga disampaikan oleh pengendara Motor Bapak Roby terkait program parkir berlangganan di Kabupaten Jember menyampikan, bahwa: “Kalau program parkir berlangganan ini saya sudah tahu, dan cara penggunaannya juga sudah tau. Menurut saya memang lebih hemat dan mudah dilakukan, karena ini kan setiap perpanjang pajak STNK sudah dapat stiker parkir berlangganan, jadi lebih simpel sekali bayar saja. Tapi orang lain masih banyak yang tidak tahu cara penggunaannya, dan sepertinya perlu adanya campur tangan dari Jukir atau pihak Dishub untuk menjelaskan fungsi stiker tersebut”.

(wawancara Bapak Roby, Jumat 20 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa sebagian masyarakat telah mengetahui tata cara penggunaan stiker parkir berlangganan, namun sebagian lainnya belum. Adanya wawancara tersebut diketahui bahwa program parkir berlangganan sudah bisa diterima masyarakat Kabupaten Jember mengingat manfaat yang diberikan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Juru Parkir Jl. Trunojoyo Bapak Selamat Suroyo menyampaikan, bahwa: “Program parkir berlangganan untuk Kabupaten Jember sendiri berjalan dengan baik. Sejauh ini masih belum ada masalah yang berat terkait program ini. Memang banyak orang yang belum paham, tetapi sesuai saran dari tim pengawas sebaiknya kami mengingatkan pengendara motor terkait stiker parkir berlangganan. Kalau untuk kendaraan luar propinsi diberi karcis dan hasilnya sekitar Rp 600.000 sampai Rp 1.000.000 hingga lebih, bergantung banyaknya kendaran yang parkir. Setelah itu kami setorkan ke unit pelaksana teknis hari senin, kadang jumat juga ketika kami bertugas disini untuk mengamankan, merapikan, hingga menyeberangkan kendaraan. Jam kerja disini ada dua shif. Shif siang dari jam 07: 00 pulang jam 14:00, shif malam dari jam 14.00 sampai jam 22 :00”. (wawancara Selamat Suroyo, Jumat 20 Desember 2019)

Sesuai hasil wawancara diatas, cukup menjelaskan bahwa Program parkir berlangganan

dapat diterapkan dengan baik di Kabupaten Jember, meskipun terdapat kendala penggunaan stiker tetapi masih bisa diatasi. Responsivitas oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa program ini dapat diterima masyarakat, meski terdapat kendala di awal penerapannya. Namun dengan adanya evaluasi yang dilakukan seminggu sekali oleh tim pengawas, kendala tersebut dapat teratasi. Respon dari masyarakat sangat penting, karena fasilitas tersebut ditujukan untuk masyarakat Kabupaten Jember. Program ini dapat dikatakan berhasil karena bisa diterima di lingkungan masyarakat, serta memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pihak-pihak terkait seperti masyarakat dan pemerintah daerah.

Ketepatan

Kriteria ketepatan berhubungan dengan rasionalitas dan substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Sejak di berlakukannya Peraturan Bupati Jember yaitu parkir berlangganan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah yang akan disetorkan pada kas daerah yang selanjutnya akan dikelola. Dinas Perhubungan hanya sebagai penerima, bukan untuk mengelola. Apabila dibandingkan sebelum menggunakan parkir manual atau harian dan parkir berlangganan yang diberlakukan mulai tanggal 1 tahun 2009 jauh berbeda. Parkir berlangganan mudah dilakukan, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Leon Lazuardy selaku Kepala Bidang Unit Pelaksana Teknis Parkir yang menyampaikan, bahwa: “Untuk menerapkan retribusi parkir berlangganan diperlukan persetujuan antara dua lembaga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah. Dua Lembaga tersebut memiliki wewenang penuh. Retribusi. Dalam hal ini masih kesulitan, karena sebagian masyarakat yang

membayar parkir berlangganan tahunan mengeluh mahal”. (wawancara Leon Lazuardy, Kamis 19 Desember 2019)

Sesuai hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa adanya kebijakan retribusi parkir berlangganan ini merupakan pertimbangan dari beberapa lembaga terkait yang di prediksi akan meningkatkan pendapatan daerah. Kebijakan ini

selain membantu meningkatkan pendapatan daerah, program ini juga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Jember. Kebijakan ini merupakan Peraturan Bupati Kabupaten Jember, sehingga menjadi prioritas pemerintah daerah dalam rencana pembangunan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Joko Priyanto selaku Bendahara Unit Pelaksana Teknis Parkir yang menyatakan bahwa:

“Kebijakan ini ada di Perbup Kabupaten Jember dengan berbagai pertimbangan antara DPRD dan Bupati, sehingga menjadi suatu program yang ditanggungjawab oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Kebijakan program ini sangat bernilai bagi daerah, karena apabila tidak dijadikan sebagai aturan maka program ini tidak akan berjalan dengan baik saat ini. Melihat perkembangan retribusi parkir hingga saat ini, apabila Bupati periode baru masih setuju dengan kebijakan ini, sepertinya program ini akan tetap dijalankan di tahun berikutnya”. (wawancara Joko Priyanto, Kamis 19 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas cukup menjelaskan bahwa kebijakan ini benar-benar dibutuhkan di Kabupaten Jember sebagai landasan diterapkannya program retribusi parkir berlangganan. Berbagai pihak terkait program tersebut tentunya memiliki pendapat berbeda-beda, salah satunya didapatkan melalui wawancara bersama Bapak Hendrik Wiyanto sebagai pengawas di lapangan mengatakan,

bahwa: “Sejauh ini penerapan program parkir berlangganan berjalan dengan baik. Pada setiap tempat keramaian di kecamatan terdapat Jukir dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Tim pengawas lapangan sampai saat ini menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Menurut Perbup Kabupaten Jember tentang retribusi parkir harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku serta mengawasi aktifitas parkir lapangan

berdasarkan prosedur yang ditentukan. Laporan dari tim pengawasan sampai saat ini belum ditemukan pungutan liar yang dilakukan oleh Jukir, namun pemerian sukarela oleh pengendara motor. Selain itu, tim pengawas melaporkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui fungsi stiker parkir berlangganan, sepertinya itu saja”. (wawancara Hendrik Wiyanto, Jumat 20

Desember 2019)

Sesuai wawancara tersebut cukup menjelaskan bahwa penerapan parkir berlangganan berjalan dengan baik, meski terdapat kendala-kendala di lapangan. Tim pengawas memberikan laporan terkait kegiatan pengawasan yang dilakukan pada Jukir yang ada di setiap kecamatan Kabupaten Jember agar tetap melakukan tugasnya sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Beberapa hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Program Parkir berlangganan ini cukup efektif dan efisien diterapkan di Kabupaten Jember. Pengalokasian tim pengawas dari Dinas Perhubungan juga baik, yaitu pada tempat keramaian tiap kecamatan. Hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan aturan yang berlaku di Kabupaten Jember. Selain itu, adanya pengawasan mingguan oleh tim pengawas, evaluasi kepada Jukir selalu dilakukan setiap seminggu sekali untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelumnya agar tidak diulangi kembali. Oleh karena itu, kebijakan program ini sangat penting mengingat pengaruh yang dimiliki oleh suatu peraturan terhadap proses penerapan program yang dijalankan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas sesuai dengan data yang sudah dikumpulkan dengan berdasarkan teori evaluasi dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai Evaluasi Kebijakan Tarif Retribusi Parkir Berlangganan Di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, yaitu:

1. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, telah diketahui kriteria-kriteria Evaluasi Kebijakan Tarif Retribusi Parkir Berlangganan Di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, diantaranya:
 - a. Efektifitas. Program parkir berlangganan sudah efektif sesuai dengan peraturan yang ada. Parkir berlangganan di Kabupaten Jember sejauh ini juga sudah bisa dikatakan efektif karena target pencapaian selalu meningkat dari tahun ke tahun, serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - b. Efisiensi. Pada program parkir berlangganan dapat ditemukan adanya kesesuaian antara sasaran/target yang ditetapkan dengan biaya yang dikeluarkan. Selain itu juga didapatkan data terkait juru parkir yang bertugas di lapangan dan diawasi oleh petugas pengawasan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember khususnya Unit Pelaksana Teknis Parkir. Adanya kecukupan juru parkir tersebut dan usaha petugas dari Dinas Perhubungan berupa pengawasan yang dilakukan sebagai penunjang keefisienan program parkir berlangganan ini.
 - c. Kecukupan. Berkaitan dengan program parkir berlangganan di Kabupaten Jember menimbulkan beberapa masalah. Masalah-masalah tersebut timbul setelah program diterapkan di lapangan dengan adanya kegiatan pengawasan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Namun, kelemahan tersebut masih dapat teratasi oleh pihak Jukir dan pihak Dinas Perhubungan. Namun terdapat beberapa keuntungan dan manfaat dalam program tersebut diterapkan, yaitu memberikan keuntungan berupa pendapatan daerah yang dikelola oleh Kas Daerah.
 - d. Responsivitas. Parkir langganan berjalan dengan baik karena seminggu sekali melakukan evaluasi oleh tim pengawas kepada para Jukir, sehingga bisa menjalankan peraturan lebih baik. Program parkir berlangganan sudah bisa diterima masyarakat Kabupaten Jember mengingat manfaat yang diberikan, meskipun untuk awal penerapannya masih membuat masyarakat bingung pada cara penggunaannya. Namun, sudah teratasi sehingga sebagian masyarakat telah mampu memanfaatkannya dengan baik.
 - e. Perataan. Biaya yang digunakan dalam penerapan program parkir berlangganan sudah sesuai dengan kebutuhan parkir berlangganan. Biaya tersebut dialokasikan kepada beberapa pihak terkait seperti Juru Parkir yang bekerja dilapangan, Tim Pelaksana Parkir, Tim pengawasan lapangan, dll. Selain itu, berkaitan dengan manfaat program ini telah dirasakan oleh semua masyarakat Jember di desa maupun kota. Masyarakat memiliki haknya dari program parkir berlangganan ini yang dialokasikan menjadi fasilitas umum lainnya.
 - f. Ketepatan. Adanya kebijakan retribusi parkir berlangganan ini merupakan pertimbangan dari beberapa lembaga terkait yang di prediksi akan meningkatkan pendapatan daerah. Kebijakan ini selain membantu meningkatkan pendapatan daerah, program ini juga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Jember. Kebijakan ini merupakan Peraturan Bupati Kabupaten Jember, sehingga menjadi prioritas pemerintah daerah dalam rencana pembangunan.
2. Berdasarkan kriteria-kriteria Evaluasi menurut William N Dunn dapat dilihat sudah berjalan dengan baik walaupun terdapat hambatan-hambatan. Hal tersebut seperti adanya masalah-masalah terkait penerapan parkir berlangganan, penggunaan stiker dan dari faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimana masih kurang nya pemahaman dan pengetahuan mengenai program parkir berlangganan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi kebijakan tarif retribusi parkir

berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, pada hemat peneliti pelaksanaan program parkir berlangganan perlu mendapatkan penyempurnaan antara lain:

1. Sumber daya manusia yaitu juru parkir lebih memperhatikan lokasi dan area parkir sehingga tidak adanya disinformasi tentang lokasi parkir berlangganan. Selain itu, juru parkir juga perlu menolak uang dari masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman masyarakat terkait parkir berlangganan.
2. Sarana prasarana yaitu adanya plang pembatas pada tiap area tempat parkir yang digunakan untuk menunjang kegiatan parkir tersebut. Selain itu, sarana prasarana terkait parkir berlangganan juga sangat dibutuhkan masyarakat Kabupaten Jember terlebih untuk keamanan kendaraan bermotor.
3. Perlengkapan fasilitas *Closed Circuit Television* (CCTV) pada tiap area parkir terutama tempat juru parkir melaksanakan tugasnya, agar lebih disiplin dan mudah terpantau kegiatannya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Selain itu, CCTV juga termasuk fasilitas yang sangat diperlukan untuk memantau keamanan kendaraan bermotor, agar terhindar dari pencurian dan kerusakan.
4. Kegiatan Sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait parkir berlangganan. Apabila masyarakat sudah memiliki bukti telah berlangganan parkir, maka tidak perlu membayar lagi ketika melakukan parkir di lapangan.

Dunn, William N, (2003). *Analisis Kebijakan Publik Edisi Ke Dua*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Haerah Kahar, 2016. Metodologi Penelitian Sosial. Fisipol Universitas Muhammadiyah Jember

Hutabarat, R Slamet Santoso Hardiansyah 2018, Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang Departemen Administrasi Publik.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 73 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Daerah.

Krisnina Marsha Lafitra 2017, Studi Evaluasi Kebijakan Paekir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Meoleng, Lexy J, 2005. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda

Meoleng LEXY J, M.A 2010, Metodologi Penelitian kualitatif, PT Remaja Rosdakarya. Bandung

Nugroho, Rian, 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta; Elex Media Komputindo

Perbub No 03. Tahun 2009. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir Harian Kabupaten Jember. Perda no 12 tahun 2008. Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* Bandung: Alfabeta

Toni Taruno Hendrawan 2017, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Studi Kasus: Kota Semarang Journal of

DAFTAR PUSTAKA

Agustinus, Leo, 2012, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Governance